

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Narasumber 1.

Nama informan : Fx. Hadi Rudyatmo
Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta
Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024
Tempat : Rumah Pribadi Fx. Hadi Rudyatmo

1. Bagaimana PDI Perjuangan menjalankan fungsi kaderisasi politik?

→ PDI Perjuangan melakukan kaderisasi itu ada sekolah partai namanya itu dimulai dari kader pratama, madya, kader utama. Sehingga dengan melalui sekolah kader ini lah kader-kader PDI Perjuangan mampu menyerap ilmu yang diberikan oleh para senior-senior partai dalam memahami tentang ideologi dasar negara, ideologi bangsa, dan ideologi partai. Ideologi adalah berasal dari kata ilmu dan logos, antara ilmu dan gagasan ini dijadikan satu sehingga menjadi paham atau ideologi, dimana ideologi PDI Perjuangan ini adalah Pancasila 1 Juni 1945 sehingga nilai-nilai pancasila itulah yang menjadi bekal bagi kader PDI Perjuangan untuk melaksanakan dan menjalankan roda organisasi dan melaksanakan dan menjalankan apabila kader-kader PDI Perjuangan ini menduduki di jabatan legislatif dan eksekutif. Sehingga dengan paham-paham atau ideologi pancasila inilah kader PDI Perjuangan punya sikap, prinsip, dan komitmen. Prinsip: berjuang adalah untuk meraih sebuah kekuasaan untuk menyejahterakan rakyat dengan sikap melayani, komitmennya menyejahterakan masyarakat.

2. Apakah artinya memang kader dipersiapkan untuk menduduki jabatan pemerintahan?

→ O ya iya. Karena kan negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem presidensial sehingga partai politik itu adalah hak untuk memilih calon-calon legislatif dan calon-calon eksekutif yang

ditugaskan sebagai petugas partai di eksekutif atau legislatif sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apakah PDI Perjuangan terkhusus di Cabang Surakarta juga mengutamakan kader sebagai kandidat dalam elektoral?

→ O ya iya. Pertama kader dulu untuk dinilai tentang elektoralnya, namun demikian proses-proses untuk mengambil kader yang mempunyai nilai elektoral yang baik itupun ada proses yang namanya penjaringan. Penjaringan itu dimulai dari usulan anak ranting itu tingkat RW, kemudian digodog di tingkat ranting itu tingkat kelurahan, nah disitu setelah digodog dibawa ke PAC tingkat kecamatan, nah dari tingkat kecamatan itu penjaringan-penjaringan itu kan ada nilainya skornya, pernah menjadi anggota partai berapa tahun, pernah mengikuti pendidikan sekolah partai sudah apa belum, hal nilai-nilai itulah yang nanti untuk menentukan proses penjaringan. Skor namanya. Pernah menjadi pengurus dan seterusnya. Lha sehingga sampai di DPC, skor itu sudah ada. Namun demikian, tidak hanya melulu dengan skor, namun ada skala prioritas, nilai struktural partai inikan lebih tinggi, lha sehingga elektoral tinggi nilainya tinggi pun kalau tidak masuk di struktural ya masuk di bawahnya dan seterusnya. Lha sehingga di DPC ini kan menjaring mulai dari anak ranting, ranting, PAC, DPC, proses penjaringan. Kalau di Solo ada 45 kursi ya kita menyiapkan 45 bakal calon. 30% dari 45 ini adalah kuota perempuan. Yang dilakukan adalah seperti itu kemudian kita kirim ke DPD dan DPP mendapatkan persetujuan untuk proses penyalonan itu sendiri. Sebelum proses penjaringan itu pun dilakukan tes dari DPP, DPP nilainya turun dan sebagainya ini bagian dari sebuah pertimbangan untuk proses penjaringannya. Sehingga nilai elektoralnya tinggi tapi tidak paham tentang ideologi partai, ideologi bangsa, ideologi negara, dan dasar negara dan pancasila ya nilainya akan dibawah. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dari luar pun yang elektoralnya tinggi namun paham tentang ideologi tadi sehingga mendapatkan porsi tersendiri. Contohnya tokoh-tokoh muda yang paham ideologi. Jadi kamu sebagai mahasiswa harus paham ideologi, harus paham pancasila, jangan sampai melupakan sejarah kalau melupakan sejarah itu sama saja melupakan orang tuamu sendiri karena sejarah itu kan proses. Kamu ada itu kan melalui proses bapak ibumu dulu berpacaran

ibaratnya seperti itu, lantas proses pernikahan, kehamilan dan seterusnya sampai proses mendidik kamu hingga akhirnya nanti menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarnya.

4. Bagaimana mekanisme pengusungan Achmad Purnomo sebagai bakal calon wali kota dari DPC PDI Perjuangan?

→ Jadi begini, Achmad Purnomo dan Teguh prakosa ini sudah melalui proses penjaringan dan melalui proses penjaringan sudah kita kirim ke DPP bahwa seluruh masyarakat Surakarta khususnya PDI Perjuangan mendukung penuh Achmad Purnomo – Teguh Prakosa menjadi wali kota dan wakil wali kota. Namun demikian, karena ketua umum PDI Perjuangan ini punya hak prerogratif menentukan siapapun itu adalah hak ketua umum; Ibu Megawati Soekarnoputri. Sehingga saat itu Pak Jokowi minta ke Saya kalau anaknya kepingin jadi wali kota ya silahkan. Karena proses penjaringan ini sudah selesai kita kirim ke DPP akhirnya Mas Gibran mendaftarnya ke DPD partai. Begitulah prosesnya sehingga dengan mendaftar kesana otomatis wali kota nya diganti Mas Gibran, wakilnya tetap Teguh Prakosa.

5. Apakah partai memberikan alasan serta kesempatan bargaining terkait keputusan rekomendasi partai kepada Gibran?

→ Ya semua tidak ada bargaining-bargaining semua kita serahkan ke DPP karena kita sebagai peserta kongres sudah memberikan hak prerogatif kepada ketua umum sehingga apapun keputusan ketua umum bagi Saya hukumnya wajib untuk dilaksanakan sehingga tidak ada bargaining-bargaining lain. Ya tentunya setelah mendapat rekomendasi kan wali kota dituntut DPP untuk sanggup memenangkan PDI Perjuangan mencapai 35 kursi waktu itu yang sebelumnya Saya 30 kursi. Namun di tengah jalan beliau mengingkari hal itu. itu saja.

6. Bagaimana reaksi internal DPC saat itu? Apakah terjadi luapan kekecewaan dan semacamnya?

→ O ya pasti ada kekecewaan. Namun demikian, Saya sebagai ketua DPC bertanggung jawab, akhirnya seluruh jajaran mulai anak ranting, ranting, PAC, DPC kita kumpulkan semua bahwa inilah pilihan dari ketua umum hukumnya

wajib kita memenangkan dan melaksanakan. Yasudah kita menangkan dan laksanakan dapat 86%.

7. Bagaimana reaksi dari Pak Achmad Purnomo sendiri saat itu?

→ Ya kecewa no. Wong Saya sendiri sebagai ketua umum partai pun ya kecewa. Kecewa, namun demikian karena ini keputusan DPP dan terlebih dari ketua umum ya sudah kita jalankan dan jalankan.

8. Saya sendiri melihat bahwa proses di Solo ini sedikit berbeda bila melihat kasus penggagalan yang serupa terjadi di tingkat Jawa Tengah saat Bibit Waluyo digantikan Ganjar kemudian Bibit keluar, atau saat pilkada Demak petahana Mugiono diganti Eistianah kemudian Mugiono keluar. Nah apakah DPC Solo ini memiliki mekanisme yang berbeda dalam mendidik kadernya sehingga hal serupa tidak terjadi saat penggagalan Achmad Purnomo dilakukan?

→ O ya ada dong. Saya karir politik nomor 1. Tahun kemaren kan DPC masih punya wewenang untuk penjaringan, wewenang melakukan kaderisasi lalu setelahnya LDK namanya Latihan Dasar Kepemimpinan lha itu nanti diikutkan dalam sekolah partai. Lha ketika kita melakukan proses penjaringan ya Kita ngotot bahwa Purnomo-Teguh itulah yang baik dan Beliau sanggup untuk memenangkan meraih 35 kursi karena sudah bersama Saya sekitar kurang lebih 8 tahun to Pak Achmad Purnomo, dan Pak Teguh ini kan pernah menjadi ketua umum DPRD Kota Surakarta dan sebagai sekretaris partai. Ya kemudian dengan pilihan seperti itu tentunya DPP juga membuat komitmen dengan yang akan diberi rekomendasi, komitmennya apa? Memenangkan 35 kursi untuk PDI Perjuangan sanggup nggak? Mestinya kan dijawab sanggup namun kan politik itu kan setiap detik itu berubah ya akhirnya diingkari dan bahkan punya keinginan menenggelamkan PDI Perjuangan. Nah hal seperti ini kan jadi pelajaran bagi PDI Perjuangan jangan sampai dipakai untuk tumpangan saja setelah itu ada pengingkaran-pengingkaran yang telah dibangun pada saat ingin memenangkan kontestasi pilkada.

9. Apakah terdapat pola yang berbeda untuk pilkada 2024 mendatang?

→ O beda. Kalau untuk 2024 ini DPC PDI Perjuangan hanya diberi kesempatan menerima pendaftaran, setelah menerima pendaftaran, fit and proper dilakukan oleh DPD, keputusan rekomendasi ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan. Kalau

sekarang seperti itu. Kalau dulu kan kita ada yang namanya musyawarah anak ranting, musyawarah ranting, musyawarah anak cabang, rakercap di cabang.

10. Apakah artinya calon yang maju ini nanti tidak melalui proses konvensi?

→ Tidak melalui konvensi, hanya Saya menerima pendaftaran 8 bakal calon wali kota, 12 bakal calon wakil walikota sudah kita kirim ke DPD dan DPP, kemudian kemaren sudah dilakukan fit and proper di DPD.

11. Apakah sejauh ini DPC merasakan perbedaan pada calon terpilih yang berasal dari kader dan outsider?

→ O sangat sangat dirasakan oleh kader partai dan anggota partai sekarang. Salah satu hal yang mesti hal yang Saya sampaikan ini terang-terangan Saya, masyarakat biasa yang mau bertemu dengan wali kota saja susah. Lantas kebijakan-kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat kecil. Yang lebih dirasa lagi pada saat PPDB. PPDB ini sudah gabisa apa-apa karena ada intervensi dari KPK untuk menjalankan PPDB yang bersih. Namun perlu Saya sampaikan bahwa dengan sistem zonasi ini justru merugikan anak-anak yang tidak mampu. Lha misal seperti di daerah sini mau sekolah di SMA 3 kan kejauhan. Lha mestinya kalau kejauhan kan harusnya mendirikan sekolahan di setiap kelurahan, SMA SMK harus ada di setiap kelurahan. Akhirnya mau tidak mau harus ke swasta. Kaya SMK dizonasi itu justru merugikan masyarakat, Saya pasionnya di seni diterima administrasi kan nggak nyambung, akhirnya sekolah ya sekolah tok jadi tidak menguntungkan masyarakat miskin. Hal-hal seperti ini harusnya menguntungkan masyarakat.

12. Apakah faktor latar belakang dari Gibran menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan rekomendasi?

→ Sebagai anak presiden ya salah satunya itu. Kan dulu kan belum tau kalau ada peristiwa seperti ini karena komitmennya membesarkan PDI Perjuangan kok. Nah sehingga diberi rekomendasi. Komitmen itu kan salah satunya kata-kata, salah satunya perbuatan kalau kata Bung Karno. Nah sehingga komitmen yang dibangun kemudian diingkari ketika proses-proses politik yang berjalan pada tahun 2024. Tetapi bagi Saya sebagai ketua partai dan kader partai yang memiliki prinsip, sikap dan komitmen yasudah kita berjuang semaksimal mungkin. Untung PDI Perjuangan di Solo dari 30 kursi masih memiliki 20

kursi, kan sebelumnya ini mau dihabiskan. Inilah yang menjadi semangat Saya kembali ketika mereview ketika mencalonkan mas Gibran dan memenangkan Mas Gibran sebagai walikota dan beliau sudah memiliki komitmen untuk membantu memenangkan PDI Perjuangan meraih 35 kursi dan akan meneruskan apa yang sudah Saya bangun dengan 3WMP itu adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang mendasar yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang waras itu adalah di bidang pendidikan, wasis itu di bidang pendidikan, wareg itu di bidang perekonomian, mapan itu di bidang peraturan perundang-undangan dan etika, papan itu adalah tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Itu sudah kita lakukan selama hampir 15 tahun.

13. Adakah kewajiban dari calon yang telah dimenangkan kepada PDI Perjuangan?
→ Ya kewajibannya tadi memenangkan dan memperoleh 35 kursi. Beliau sanggup dan pada saat pemaparan strategi juga beliau hadir.
14. Ketika hal itu diingkari adakah punishmen yang diberikan partai?
→ Kalau untuk menjatuhkan punishmen itu kan yang bisa melakukan DPP partai bukan DPC. Kalau sampai sejauh ini bukan punishmen ya tapi sudah dianggap Gibran bukan kader PDI Perjuangan, itu saja.

Narasumber 2.

Nama informan : Suharsono, S.H., M.H.

Jabatan : Kader Partai PDI Perjuangan dan Anggota DPRD Kota Surakarta terpilih periode 2019-2024

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024

Tempat : Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta

1. Sudah berapa lama Anda menjadi Kader PDI Perjuangan?

→ Saya masuk ke sayap struktural sejak tahun 2000 jadi sudah 24 tahun, tapi sebagai simpatisan PDI-P sejak SMA ikut kampanye segala, dan loyal artinya dengan perkembangan multipartai itu saya tetap di PDI Perjuangan tidak pernah pindah-pindah. Jadi kalo di stuktural 24 tahun, pertama sebagai Ketua Departemen Hukum dan Advokasi tahun 2000 setelah itu Saya di 2003 dalam tanda petik ditugaskan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Solo sampai 2008. Setelah dari KPU, Saya masuk lagi di PDI menjabat sebagai ketua Departemen Hukum dan HAM. Kemudian tahun 2010, Saya diangkat menjadi Wakil Ketua DPC Bidang Hukum, HAM, dan Politik, terus sampai sekarang masih. Sekarang itu bidangnya lebih luas jadi Politik, Hukum, HAM dan Aspirasi Rakyat, sekarang Saya disitu; wakil ketua DPC.

2. Bagaimana proses rekruting kader PDI Perjuangan?

→ Jadi rekruting untuk menjadi aktivis di PDI Perjuangan itu tingkatannya adalah menjadi anak ranting dulu: anak ranting itu tingkatannya ada di level RW. Kemudian di atasnya ada yang namanya ranting: ranting itu di tingkat kelurahan. Kemudian di level Pengurus Anak Cabang itu PAC di tingkat kecamatan. Kemudian di tingkat kota itu ada DPC. Sebenarnya dulu ada pendidikan kader, jadi setiap kader sebelum naik ke jenjang di atasnya itu ada pelatihan-pelatihan. Ada kader pratama, kader madya dan sebagainya. Tapi beberapa tahun terakhir sempat ngga jalan. Tapi konsolidasi, pengkaderan, pendidikan yang tidak memakai metode seperti itu terus berjalan. Jadi ada konsolidasi di tingkat ranting, tingkat PAC, DPC itu ada terus dilakukan.

3. Bagaimana mekanisme untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di PDI Perjuangan?

→ Jadi mulai 2005 itu ada proses penjaringan. Ya jadi setiap pilkada itu agak sedikit berbeda tapi prinsipnya ada proses untuk menjadi calon kepala daerah yang kalau disini wali kota dan wakil walikota. Tahun 2005 itu kan saya masih di KPU, Jadi tahun 2000 kan saya di departemen, tahun 2003 ke KPU, di 2005 kan ada proses pemilihan kepala daerah, disitu ada proses penjaringan dari anak ranting, ranting, PAC, DPC, kemudian ada proses lagi namanya konvensi. Konvensi ini dilakukan di tingkat DPC. Ada beberapa calon kemudian dari konvensi itu diajukan ke DPP. DPP turun rekomendasi. Jadi ada konvensi dulu siapa yang direkomendasikan DPC untuk diajukan kesana, kemudian turun satu saat itu turun Pak Jokowi dan Pak Rudy itu 2005. Kemudian 2010 itu sama tapi calonnya tetep pak Jokowi sama Pak Rudy. Kemudian di 2015 sama, penjaringan itu ada beberapa calon tapi kemudian yang muncul Rudy dan Purnomo. Kemudian di 2020 proses penjaringan lagi sama, dari anak ranting, ranting, PAC, DPC muncul Purnomo Teguh. Tapi di tengah jalan kemudian muncul proses yang tidak sesuai dengan peraturan saat itu karena mereka daftar lewat DPD dan DPP langsung, kemudian turunlah nama Gibran Teguh, Purnomo tersingkir. Ini yang terjadi di tahun 2020.

4. Apakah artinya proses pencalonan dari Pak Achmad Purnomo adalah hasil konvensi dari internal DPC?

→ Ya, Betul. Itu mulai dari anak ranting Saya ikut ngawal proses itu. Ranting, PAC, dan DPC itu sudah fix keluar nama itu. Calonnya banyak saat itu, tapi semuanya tersingkir akhirnya muncul dua nama itu sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota: Purnomo sama Teguh.

5. Pada saat rekomendasi DPP jatuh kepada Gibran, Apakah di internal DPC ada gejolak tertentu seperti seperti bentuk kekecewaan atau sebagainya?

→ Kalau kekecewaan ada. Tapi ekspresi kekecewaan seperti misalnya melakukan komplimen politik, melakukan gerakan-gerakan menentang rekomendasi itu tidak ada karena ketua DPC dan kita semua diajak punya prinsip untuk tegak lurus pada keputusan DPP. Apapun tujuan DPP harus kita amankan karena ini jadi keputusan kongres di Bali saat itu bahwa ketua umum

itu punya hak prerogatif untuk menentukan atau mengambil keputusan-keputusan politik.

6. Berarti dapat dikatakan bahwa yang meleramkan bentuk kekecewaan itu ketua DPC. Apakah benar?

→ Ya. Ketua DPC. Dan itu tidak satu momentum itu. Jadi kan ada konsolidasi terus menerus, pertemuan terus menerus. Itu adanya faksun bahwa kita harus tegak lurus partai itu selalu didengarkan. Jadi tegak lurus partai itu dimulai dari anak ranting tegak lurus ranting, ranting tegak lurus kepada PAC, PAC tegak lurus kepada DPC, DPC tegak lurus kepada DPP. Jadi ujungnya ke DPP itu harus tegak lurus, sehingga kita ga ada gerakan politik penolakan.

7. Apakah pusat (DPP) memberikan penjelasan mengenai keputusan pemberian rekomendasi kepada Gibran?

→ Ada sih kepada Ketua DPC, dan kebetulan Saya cukup dekat dengan ketua DPC nggih. Jadi saat itu Bu Ketua Umum bilang: ini kita harus memunculkan kader muda. Tidak nepotis ya. Kalau Saya pribadi sebelum turun rekomendasi di jejak digital Saya itu ada di fb di wa itu Saya mengkritisi bahwa Saya tidak setuju dengan nepotisme. Karna apa? Karna meskipun itu muda kalau prosesnya melalui proses nepotisme berarti dia bergantung pada orangtuanya atau hirarkinya. Jadi kaya patronnya; siapa yang jadi patronnya, tidak harus orang tuanya langsung tapi kerabatnya juga bisa. Sejak dulu Saya tidak menyetujui proses politik seperti itu. Itu Saya kritisi, Saya bilang “itu kan bapak ya bapak sendiri; anak ya anak sendiri”, Saya bilang “filosofi Jawa itu kan ada yang namanya anak polah bapak keprada. Kalau anaknya ada sesuatu pasti bapaknya tidak tinggal diam, pasti dia cawe-cawe”. Nah ini satu kepastian, nggak mungkin tidak. Nah ini kami tentang. Tetapi sesudah direkomendasikan kita tolak. Saat itu informasi yang sampai kepada Saya dari Ketua DPC itu: Kita harus mulai melirik istilahnya atau mulai memunculkan kader-kader muda daripada nanti diambil oleh partai lainnya. Karena saat itu kan Gibran adalah anaknya Jokowi, Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan. Sehingga akhirnya Pak Ketua DPC gabisa apa apa karena komitmennya tunduk kepada ketua umum. Jadi ada masukan bahwa itu kan anaknya presiden pasti menang, nggak seperti itu, mudanya yang diambil, karena mudanya.

8. Sebagaimana yang bapak ungkapkan bahwa orang tua itu pasti terlibat. Berdasarkan wawancara Pak Rudy dengan salah satu chanel platform youtube, itu mengatakan bahwa Pak Jokowi justru yang pertama kali mendatangi dan menyatakan bahwa Mas Gibran ini ingin jadi walikota. Saat hal itu terjadi apakah Pak Rudy mengajak DPC untuk berunding karena saat itu DPC sudah membuat keputusan untuk mengusung Pak Achmad Purnomo?

→ Jadi Pak Rudy sebelum rekomendasi turun pun tetap berpegang pada Purnomo Teguh, termasuk kita. Bahkan di setiap konsolidasi itu sebenarnya ada suara-suara kalau nanti turunnya bukan Purnomo-Teguh itu nanti kita mengundurkan diri semua. Itu sebelum rekomendasi. Ya semacam bargaining position ya. Tidak jago saya ini jadi ya kita mundur. Tetapi ketika berproses kemudian ada dialog-dialog ketua DPC dengan ketua umum akhirnya diputuskan Gibran Teguh ya kita terima. Kecuali kalau ketua DPC mengatakan: “nggak. Seperti komitmen awal kita mundur semua”, ya kita akan mundur semua”. Tetapi kan berarti itu bertentangan dengan keputusan konggres bahwa ketua umum punya prerogatif untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Makanya kita namanya tegak lurus dengan ketua DPC. Itu dinamikanya. Cukup lama kita sudah berkonsolidasi, sudah solid sekali dengan pencalonan Purnomo Teguh sebenarnya. Tapi kita ya betul-betul bulat mba, saat itu dapat 70 persen lebih saat Gibran. Itu artinya kita nggak mbalelo karena pengamatan saya, suara PDI Perjuangan itu yang terburuk dalam konstetasi pemilu itu dapat 15 kursi setelah reformasi; setara dengan sekitar 30 persen suara, itu PDI saja belum simpatisan-simpatisan PDI. Pada waktu itu, tahun 2020 itu kita dapat 24 kursi, itu sekitar 40-an persen. Kalau kita dapat 30, berarti 30 itu dari simpatisan DPI sama relawannya pihak sana; bukan merah. Berarti kan suara kita bulat meskipun ada proses perbedaan pendapat di proses pencalonan, suara PDI kan bulat karena kita dapat 70 persen, kita sendiri dapat menyumbangkan sekitar 40 persen karena 24 kursi. Sekarang 30 kursi di tahun 2019, setelah pilkada kita dapat 30 kursi. Jadi kita solid mba di Solo. Luar biasa memang

9. Lalu pendapat bapak sendiri sebagai politisi senior yang sudah pernah di kader mengikuti semua rangkaian kaderisasinya hingga kini menjabat dua kali di DPRD, menurut bapak bagaimana fenomena pencalonan pilkada 2020 ini?

→ Ya kalau dalam teori politik itu diskresi. Diskresi itu artinya tidak sesuai peraturan tetapi untuk kepentingan, kalau ini partai ya kepentingan partai atau kepentingan umum. Its okey, tapi kalau dari perspektif kaderisasi itu tidak tepat, meskipun dibenarkan itu tidak tepat karena menurut saya kader itu ya melalui proses tadi sejak awal dan dia berhak untuk menempati posisi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Di bukunya Miriam Budiarjo itu kan ada infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Suprastruktur politik itu jabatan di legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang ini prosesnya bisa direkrut dari partai politik, dari pressure group, dan sebagainya. Kalau di partai politik, kita bicara adalah kader kader ini berproses di infrastruktur politik ini harus ke suprastruktur politik untuk membangun bangsa ini atau karir politiknya. Jadi melalui politiknya, ia bisa ke legislatif jadi dewan, ke eksekutif jadi walikota, bupati, gubernur dan seterusnya. Mestinya jalurnya itu. Tetapi ketika ada praktik secara itu, kalau Saya ditanya pribadi ya Saya sangat sangat tidak setuju karena bertentangan dengan yang namanya undang-undang politik, disana ada satu item bahwa kewajiban partai politik melakukan pendidikan kader. Pendidikan kader ini kalau kita kaitkan dengan teori politik yang ada infrastruktur tadi berarti diarahkan kesana tapi ini ditabras. Maka saat ada fenomena 2020 ini kita kaitkan dengan kekinian berarti terbukti bahwa mekanisme yang tidak sesuai dengan mekanisme partai tidak sesuai undang-undang itu merusak konstitusi. Jadi oligarki itu artinya merusak, dengan proses patronalistik kemudian nepotisme; KKN itu mewarnai akhirnya. Contohnya putusan MK 90 itu kan jelas sekali, prosesnya menjelang pemilu mengubah syarat umur kemudian kesempatan yang menjadi calon ini hanya tunggal anak presiden. Kelihatan sekali ada nepotisme ada KKN. KKN nya di Yudikatifnya, nepotismenya adalah Bapaknya yang cawe-cawe. Akhirnya terbukti. Ini kalau tidak dihentikan ke depan ya rusak demokrasi kita. Waktu pemilu saya menjadi komisioner pemilu betul-betul menjaga netralitas dan sebagainya, Saya bahkan membongkar kecurangan-kecurangan. Akhirnya KPU saat itu mendapatkan piagam charter dari presiden Jimmy Charter itu karena proses saat itu benar-benar bersih meskipun saat itu ada kasus non politik; kasus hukum yang kena suap korupsi saat itu. Suap itu dalam pengadaan bukan dalam mengubah suara

dan sebagainya, itu Alm. Pak Mulyah Kusuma sama ketuanya KPU; dosen Unair. Tapi proses politiknya betul-betul bersih. Nah ini sekarang kan rusak betul-betul ada rekayasa politik untuk kepentingan hegemoni kekuasaan. Nah ini pendapat saya pribadi jadi kalau ditanya di 2020 itu Saya tidak setuju karena itu sudah nepotisme, patrenalistik kemudian tidak sesuai dengan teori politik. Sebenarnya Saya mengkritisi meskipun dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan Saya dua kali menang sebenarnya Saya setuju kalau itu nomor urut bukan suara terbanyak karena undang-undangnya masih mengatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik bukan perorangan, tetapi untuk menjadi pemenang itu perorangan, kan lucu ini nggak pas. Kalau undang-undangnya dirubah sistem ketataan negara kita dirubah bahwa ada calon independen di legislatif gitu baru oke, ini undang-undangnya masih sistemnya masih. Itu pendapat pribadi Saya.

10. Kemudian untuk mekanisme rekrutmen kedepan, apakah DPC PDI-P ingin kembali menerapkan sistem rekrutmen yang dimulai dari kader-kader seperti yang sudah dijelaskan?

→ Kita inginnya juga seperti itu mbak, tapi tahun 2024 ini sudah berbeda lagi peraturannya. Jadi model pencalonannya adalah kita DPC hanya diberi kewenangan untuk menerima pendaftaran kemudian pendaftaran itu setor apa adanya ke DPP melalui DPD, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, DPD dan DPP mempunyai hak untuk membuka secara online pendaftaran itu. Ini yang di 2024 ini. Tapi meskipun begitu kami yang di DPC ini Pak Rudy memerintahkan Saya secara pribadi ditemani dengan beberapa teman untuk membuka survey sebelum pendaftaran itu. Kemudian setelah pendaftaran melakukan adu gagasan dari masing-masing calon. Jadi meskipun formalitas nanti cuma mengirim nama tapi ketua DPC punya catatan-catatan dari hasil survey maupun adu gagasan karena kedekatan emosional dari ketua DPC dan ketua umum, jadi ada catatan bahwa kita sudah melakukan survey, survey tertinggi ini, kemudian kita sudah melakukan adu gagasan hasilnya sudah kita rekam kita berikan kesana biar dinilai sendiri. ini inovasi kreativitas jadi kita nggak mau tinggal diam kayak memilih kucing dalam karung. Kalau mendaftar kan kita gatau siapa orangnya diserahkan kesana, tapi dengan catatan-catatan

kan mestinya DPP juga mikir ini yang udah berproses di Solo ini lain daripada yang lain karena sudah melalui survey dan kita nanti tidak hanya satu kali meskipun DPD juga survey, kita sudah siapkan survey juga setelah survey yang pertama itu kan mereka belum sosialisasi baru daftar aja, nah setelah daftar, adu gagasan kita akan survey lagi. Nanti hasilnya bagaimana sebelum turun rekomendasi kita serahkan kesana. Jadi kembali ketika panjenengan tanya apakah mau kembali ke model-model kaderisasi untuk menemukan, iya kami pengennya kesana karna itu amanat undang-undang dan prinsip-prinsip daripada kader partai politik. makanya kemungkinan besar ya kita berharap calon-calon yang muncul adalah kader partai politik murni entah itu AD1 atau AD2 nya. Kita pengen kembali ke kader dan ini tuntutan dari beberapa kali konsolidasi setelah pasca pemilu dengan mungkin masih diwarnai kekecewaan bahwa yang diluar kader itu ternyata pengkhianat maka kita akan menjalankan kader-kader kita sendiri. ini perkembangannya seperti itu.

Narasumber 3.

Nama informan : YF Sukasno

Jabatan : Kader Partai PDI Perjuangan dan Anggota DPRD Kota Surakarta terpilih periode 2019-2024

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024

Tempat : Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta

1. Kapan Anda mulai bergabung dengan PDI Perjuangan?

→ Saya sudah di PDI Perjuangan, kan sebelumnya PDI. Saya masuk di PDI ini secara resmi artinya menjadi pengurus, dulu namanya Ketua Kelompok tahun 1982. Tapi sebelum itu tahun 1977 saya sudah ikut kampanye. Tapi saya masuk menjadi pengurus PDI 1982, terus sampai sekarang. Sampai sekarang menjadi PDI Perjuangan. Dulu gambarnya masih segi lima itu, gambar kepala banteng itu sampai saat ini. Terus saya berada di PDI Perjuangan. Jadi saya mulai kaderisasi berjenjang. Di PDI Perjuangan itu, kaderisasi itu berjenjang, ada kader pratama, ada kader madya, kader utama, terus ada guru kader. Saya sudah pada tahap guru kader.

2. Bagaimana mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah di PDI Perjuangan?

→ Setiap periode kebijakan Dewan Pimpinan Pusat agak berubah yang dulu dengan sekarang, yang sekarang ini pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara terbuka, artinya Dewan Pimpinan Cabang membuka pendaftaran, terus siapapun boleh daftar. Jadi tidak hanya kader internal, eksternal pun yang bukan kader partai boleh, ada pengusaha daftar boleh dan seterusnya. Itu namanya penjangkaran. Jadi DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Tingkat Kota ini diberi kewenangan menjaring. Menjaring itu siapa saja yang daftar ya sudah ditampung terus nanti dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat. Di sana yang akan menentukan sampai keluarnya rekomendasi. Itu yang untuk periode Kepala Daerah 2024 ini sampai 2029. Tapi yang dulu itu mulai dari pengusulan rapat dari anak ranting: anak ranting itu wilayahnya setingkat RW. Terus dari anak ranting rapat mengusulkan siapa. Jadi umpamanya satu

kelurahan itu ada 10 RW, berarti 10 RW itu menggelar rapat bareng-bareng. Nanti di RW 1 keluar nama siapa? Si A, si B, si C mungkin ya. RW 2 keluar nama siapa? Bisa saja hanya dua nama. RW 3 atau anak ranting 3 siapa dan seterusnya. Jadi strukturnya organisasi PDI Perjuangan itu njenengan ketahui bahwa kami itu punya kepengurusan di tingkat RW namanya anak ranting, di atasnya adalah ranting itu setingkat wilayahnya kelurahan. Terus di atasnya itu kelurahan ada yang namanya pengurus anak cabang atau PAC itu setingkat kecamatan wilayahnya. Terus di atasnya itu ada nama Dewan Pimpinan Cabang itu satu kota atau kabupaten. Di atas itu ada DPD Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, berarti di Semarang, itu membawahi seluruh DPC. Terus ada di atasnya ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Nah itu strukturnya partai, ada badan-badan, ada sayap-sayap. Itu harus njenengan ketahui karena di partai lain belum punya itu. Jadi dinamakan setingkat RW dinamakan pengurus anak ranting, setingkat kelurahan dinamakan pengurus ranting, setingkat kecamatan dinamakan pengurus anak cabang, setingkat Kota/Kabupaten dinamakan Dewan Pimpinan Cabang. Setingkat Provinsi dinamakan Dewan Pimpinan Daerah. Setingkat Indonesia di pusat di Jakarta dinamakan DPP.

3. Mengenai kebijakan kaderisasi di setiap cabang, Apakah dikelola berdasarkan kebijakan peraturan dari cabang itu sendiri atau mengikuti instruksi dari pusat?
→ Dari pusat itu ada instruksi, kaderisasi itu pasti ada. Jadi keputusan pusat harus mengadakan kaderisasi di tiap kota atau kabupaten. Nah nanti kota kabupaten mengadakan kaderisasi. Saya di Dewan Pimpinan Cabang sebagai Wakil Ketua DPC Bidang Organisasi Keanggotaan dan Rekrutmen Kaderisasi.
4. Apakah artinya pola kaderisasi di seluruh cabang PDI Perjuangan ini sama?
→ Polanya sama, hanya mungkin ya situasional, situasional itu ada yang DPC mayoritas PDI Perjuangan. Berarti kan kaderisasinya lebih mudah. Tapi umpamanya DPC yang disana anggota Dewanya saja hanya dua, kaderisasinya pasti ya menemui banyak kendala.
5. Dalam konteks Pilkada 2020, Bagaimana mekanisme pengusungan Pak Ahmad Purnomo dan Pak Teguh Prakoso oleh DPC?

→ Itu dulu dari aspirasi anak ranting. Dari hasil rapat-rapat tingkat RW tadi tingkat anak ranting. Seperti yang saya ceritakan tadi, mereka rapat. Jadi anak ranting satu rapat, muncul siapa usulannya, ya dulu muncul Pak Ahmad Purnomo, Pak Teguh, atau yang lain. Anak ranting dia siapa? Dan seterusnya. Setelah ini semua ditarik ke ranting (ranting itu tingkat kelurahan). Contohnya satu kelurahan ada 10 RW berarti ranting ini tadi punya struktur 10 anak ranting. Nah ini rapat di tingkat musyawarah ranting. Dari calon siapa-siapa-siapa kumpul. Terus diinventarisir nama-nama siapa saja. Ternyata yang banyak Pak Purnomo-Teguh. Terus dibawa ke tingkat PAC tingkat kecamatan. Di kecamatan bertemu dengan ranting-ranting lain. Berarti satu kecamatan itu contoh ada 10 kelurahan. Berarti masing-masing utusan kelurahan ini tadi ketemu di tingkat kecamatan. inventarisir lagi ternyata yang banyak Purnomo-Teguh. Terus dibawa ke DPC. Kalau Solo ini ada 5 kecamatan berarti ada 5 PAC bertemu di tingkat DPC, yang terbanyak Purnomo-Teguh. Ya sudah, dari DPC itu dibawa ke DPP. Dibawa ke DPP. Baik berjencangnya begitu. Maka saya ceritakan tadi untuk periode yang ini.

6. Apakah berarti bisa dikatakan bahwa pencalonan Pak Ahmad Purnomo ini sebenarnya bukan atas kemauan pribadi atau berdasarkan ambisi jabatannya melainkan berdasarkan dorongan?

→ Enggak, tapi dorongan atas aspirasi dari masyarakat. Ya berarti seandainya anak ranting itu yang rapat ada 20, satu ranting ada umpamanya 30 RW, ya kalikan saja seumpama 30 kali 20 berarti sudah berapa ratus yang menginginkan. Berarti kan bisa dikatakan ini mufakatnya seluruh anggota yang sudah disolot.

7. Apakah faktor pencalonan Achmad Purnomo yang merupakan bentuk dorongan menyebabkan Achmad Purnomo sendiri sukarela untuk memundurkan diri dalam pencalonan Pilkada Surakarta 2020?

→ Di dalam PD Perjuangan itu ada yang namanya memberikan kewenangan sepenuhnya pada ketua umum di kongres, sehingga ketua umum itu mau membuat rekomendasi pada siapapun tidak ada penolakan. Tingkat DPD provinsi, DPC Kota Kabupaten tidak menolak. Seperti konkretnya kemarin yang Purnomo Teguh kan sudah ke DPP dan itu sudah pilihan semua kader.

Tapi begitu rekomendasinya turunnya Gibran-Teguh, ya sudah orang di bawah mau nggrundel mau mengeluh mau apapun, orang partai harus melaksanakan instruksi partai.

8. Apakah dari para kader sendiri memunculkan sebuah sikap kekecewaan atau semacamnya?

→ Enggak. Mau kecewa atau menggerutu atau apa, tapi karena sudah itu yang jadi instruksi partai ya harus dilaksanakan. Ya pasti ada semacam “loh kok ngerti-ngerti ini?”, dan seterusnya”. Kalau Pak Purnomo ya kita enggak tahu, karna kita enggak bisa menilai apa yang ada di dalam hati Pak Purnomo kecewa apa enggak. Tapi beliau kan juga kader partai ya bagaimanapun ya harus menerima karena itu instruksi dari pusat. Terlepas dari itu ya menggerutu, gelo atau apa ya pasti ada.

9. Apakah di dalam internal DPC mengadakan pembahasan untuk menanggapi peristiwa pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Surakarta?

→ Enggak. Itu kan hanya Pak Jokowi ketemu Pak Rudi secara internal. Setelah turun rekomendasi itu sudah enggak ada lagi pembahasan, tapi ya dilaksanakan. Enggak ada lagi diskusi yang lain karena dari DPP sudah turunnya nama itu ya sudah semua harus memenangkan nama itu.

10. Bagaimana pendapat Bapak pribadi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah Kota Surakarta tahun 2020 lalu?

→ Kami enggak pada kapasitas untuk menilai keputusan DPP. Sebagai kader partai kami tidak diajarkan untuk menilai keputusan DPP, tapi keputusan DPP itu harus dilaksanakan. Jadi ya sudah meskipun menggerutu tetap harus dilaksanakan. Jadi, orang berpartai itu jangan kesana kesini untuk nyalon ke kepala daerah, pindah sana sini. Enggak begitu cara berpartai, dan di undang-undang tentang partai politik kan ada tentang ideologi partai yang artinya keyakinan itu enggak bisa lepas, itu oportunistis saja tentang kekuasaan. Orang berpartai belum tentu bisa menjadi anggota dewan, belum tentu bisa menjadi kepala daerah, tapi dia tetap setia. Kalau dia sudah tahu ideologinya, dia sudah menjiwai, maka dia sulit untuk lepas. Tapi sekarang banyak yang berpartai tanpa ideologi, hanya kepengen kekuasaannya saja, yang enggak perlu kaderisasi. Yang penting daftar Bupati lewat partai A, ganti lewat partai B. dia

pasti enggak tau tentang AD-ART partai, enggak tahu tentang ideologi partai, terus kok daftar? Nah itu yang harus direformasi dari undang-undang dan sikap-sikap. Kader partai dididik supaya siap tapi sistem pemilihan ini memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai uang. Kalau tidak punya uang, njenengan gabisa mengikuti kompetisi dengan proporsional terbuka seperti kemarin itu. Padahal kan sebagai pengurus partai sudah bertugas, ikut rapat, konsolidasi dimana-mana selama bertahun-tahun. Bahkan satu bulan atau dua bulan sekali njenengan memimpin rapat kesana kemari, tapi begitu pencalonan, karena enggak punya uang ya enggak bisa jadi.

11. Apakah artinya sekarang ini partai sering dijadikan sebagai alat memperoleh jabatan saja?

→ Iya. Padahal jabatan itu seharusnya korelasinya dengan pendapatan. Sebagai kepala daerah yang kalau ditanya kenapa mau mencalonkan diri kemudian menjawab ingin menyejahterakan masyarakat tapi belum tau caranya, ya caranya dengan APBD, bukan membantu menyebar sembako di pinggir-pinggir jalan. Kalau njenengan mau tau gaji Bupati dan Walikota itu berapa, gaji anggota dewan berapa, biaya kampanye berapa, ya enggak sesuai. Maka PDI Perjuangan mengusulkan proporsional terbuka itu diganti karena ga sesuai dengan konstitusi kita. Karena dalam konstitusi itu, Bung Karno mengatakan musyawarah bukan voting. Proporsional terbuka kan semacam voting. Njenengan sudah mengabdikan di Partai 15 tahun lalu ada orang kaya datang berkompetisi dengan njenengan ya njenengan kalah walau sudah 15 tahun. Ada enggak? Ada!

12. Apakah hal serupa juga terjadi dalam pencalonan Gibran pada Pilkada lalu?

→ Ya kalau itu pasti ada hubungannya dengan jabatan Bapaknya. Coba njenengan dulu mampir ke DPD Provinsi “Pak Kula ndaftar” kemudian ditanya dari mana, dan menjawab dari DPC Solo, ya mungkin disuruh daftar ke DPC. Mungkin gitu, tapi karena anak orang yang punya jabatan ya diterima, lalu dibawa ke DPP dan diinstruksikan ke kita ya kita sudah tidak ada diskusi lagi. Yasudah harus dimenangkan. Karena budaya di PDI Perjuangan seperti itu. Makanya sistemnya ini harus diubah. Karena kader partai politik gabisa berbuat banyak kalau sistemnya seperti ini. Coba saja seperti saat Mas Gibran

mencalonkan sebagai wakil presiden dari partai-partai tersebut, kan kader-kader yang lain juga pengen sebetulnya.

13. Berdasarkan kacamata politisi bapak, apa faktor utama yang menjadikan Gibran diberikan rekomendasi?

→ Ya tidak ada hal lain. Saya nggak tau apa pertimbangan DPP, tapi seorang anak presiden mau daftar di partai manapun pasti diterima. Jadi kalau ditanya apakah itu ada kaitannya dengan jabatannya bapaknya, kok naif banget kalau ada yang mengatakan: “ngga ada, itu kapasitas”. Kapasitas apa? Kaderisasi aja belum pernah ikut. “itu kapabilitas”, kapabilitas apa? Ya kaya sekarang diajukan jadi wakil presiden, pertimbangannya apa? Ngga ada.

14. Maka dapatkah dikatakan bahwa kaderisasi itu penting sebagai syarat pencalonan?

→ Kaderisasi itu penting bagi seorang kader partai dan orang yang berkecimpung di partai. Tidak bisa asal-asalan. Karna bangsa ini secara konstitusi mengatakan kalau partai politik memeran peran penting. Seperti untuk menjadi anggota DPR kan harus partai politik. Bupati dan Walikota diberi mandat oleh rakyat, dimana rakyat pemegang kekuasaan tertinggi yang menugaskan bupati/walikota memikirkan nasib rakyat. Kemudian rakyat juga punya wakil yaitu dewan yang diberi mandat untuk mengawasi bupati/walikota. Itulah perbedaan tugas kami meskipun sama-sama pilihan rakyat. Jadi memang kita cukup pusing karna bila begini terus bisa saja anggota dewan itu dibiayai pemodal besar oligarki hingga 3 milyar atau lebih. Bagi seorang pemodal kan bukan nilainya tapi keinginanya. Dia tidak masalah mengeluarkan uang untuk menjadikan anggota dewan, tapi setiap kebijakannya harus ngomong dan berembung dulu dengan pemodal. Bisa tidak begitu di proporsional terbuka ini? Ya bisa. Coba bayangkan kalau dalam skala besar, negara ini bisa saja dibeli dengan keperluan mereka seperti contohnya menginginkan tambangnya untuk dikelola ini itu yang dilaksanakan melalui kebijakan undang-undang. Tapi kalau undang-undang kesulitan karna harus melibatkan DPR RI ya buat PP, kalau terlalu lama ya buat Perpres atau Pergub. Semua serba disesuaikan di zaman seperti ini. Ngga ada peraturan yang dilanggar ya karna aturannya yang disesuaikan.

15. Bagaimana hubungan DPC dengan Gibran saat ini?

→ Kalau itu sudah tidak ada hubungan lagi. Sebenarnya berdasarkan diundang-undang partai politik, partai politik itu dilarang untuk mendirikan perusahaan yang menghasilkan income, padahal partai politik punya cita-cita yang dinamakan garis-garis partai yang disampaikan ke masyarakat lalu kemudian dinilai dan disetujui masyarakat. Seperti contohnya misal PDI cita-citanya membebaskan biaya kesehatan, lalu kalau ditanya apakah PDI bisa membiayai? Ya tidak. Lalu siapa yang bisa menjalankan? Ya dari awal tadi saat masyarakat memenangkan PDI karena garis-garis nya lalu PDI mempunyai kepala daerah, ya itu yang harus memperjuangkan. Kan kepala daerah maju bersama dengan cita-cita yang dimiliki partai. Beda cerita kalau mencalonkan diri secara independen. Hal ini berlaku mulai dari walikota, gubernur hingga presiden. Artinya itu hubungan yang terputuskan kan sebetulnya.

16. Adakah sanksi yang diberikan bila kandidat terpilih partai melupakan cita-cita partai?

→ Ya sebetulnya ada. Tapi ya bagaimana, kan tidak mungkin misal seorang gubernur diberi sanksi oleh partai, mosok gubernur dipecat partai kan tidak mungkin. Jadi ya DPP tidak pernah memberi sanksi. Tapi masyarakat bisa menilai.

17. Apakah terdapat kewajiban dari kandidat terpilih kepada partai PDI sebagai pengusung?

→ Kalau itu internal, jadi Saya tidak tau. Tapi kalau ditingkat kota/kabupaten ya ada. Cuman kalau lebih tinggi lagi Saya tidak tau. Dari mulai bupati/walikota dan anggota dewannya itu ada gotong royong untuk menghidupi partai seperti misalnya partai memiliki mobil jenazah yang tidak dipungut biaya nah itu yang memberi BBM nya ya kita. Jadi ya tetap ada.

Narasumber 4.

Nama informan : Wahyu Haryanto, S.E.

Jabatan : Kader Partai PDI Perjuangan dan Anggota DPRD Kota Surakarta terpilih periode 2019-2024

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024

Tempat : Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta

1. Bagaimana perjalanan karir Bapak di PDI Perjuangan?

→ Perkenalkan Saya Wahyu Haryanto, rumah di Sondakan, Solo. Saya masuk di legislatif sejak tahun 2019 hingga 2024, dan nanti untuk 2024 hingga 2029, Saya masih diberi amanah oleh warga untuk menjadi anggota DPRD. Perjalanan politik Saya tidak serta merta langsung tetapi berproses dari organisasi masyarakat dan dari organisasi kepemudaan. Jadi kalau bergabung secara resmi di PDI Perjuangan sejak awal tahun 2014. Sebelumnya berorganisasi di HIPMI; Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Surakarta, kemudian Saya bergabung di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Jadi berkembang mulai dari pengurus kota hingga provinsi, kemudian bergabung dengan Kadin, Kapindo, dan organisasi lainnya. Ketika bergabung di PDI Perjuangan pada waktu itu Saya ditempatkan di Sayap partai taruna merah putih pada 2014. Jadi Saya diberi amanah untuk menjalankan sebagai sekretaris taruna merah putih yang adalah sayap partai dari PDI Perjuangan yang membawahi unsur kepemudaan. Disitu kemudian 2018 ditugasi partai untuk mendaftar sebagai calon legislatif dan 2019 Alhamdulillah diamanahi oleh warga sehingga bisa menjadi anggota legislatif.

2. Apakah boleh diceritakan bagaimana pengalaman kaderisasi di dalam PDI Perjuangan?

→ Dari 2014 hingga 2019 itu Saya mengikuti proses konsolidasi, proses pendidikan politik, lalu setiap ada kesempatan diundang oleh partai politik. Itu kalau di tingkat Kota. Kemudian juga ada kader dasar di taruna merah putih yang diadakan oleh DPP Jakarta. Kalau ada kegiatan sekecil apapun di tingkat kelurahan, kecamatan, itu kita ikuti. Disitulah proses menjadi kader, sehingga

di setiap proses itu pasti ada sesuatu yang menebalkan kita, berpolitik harus bagaimana, jadi sedang membentuk kita untuk mencari patron, siapa yang akan kita contoh, siapa yang akan kita jadikan guru kita dalam berpolitik. Dari dasar sendiri mulai dari kaderisasi kemudian interaksi dengan sesama kader tingkat kota, tingkat provinsi maupun Indonesia saat berkumpul, sehingga Saya semakin memantapkan diri bahwa Partai PDI Perjuangan adalah partai yang mengorganisir atau partai yang selalu bersama dengan rakyat. Kalau kami menamakan kaum marhen. Itu yang harus kami perjuangkan karena di kota besar pun, disana masih ada kaum marhen yang membutuhkan akses politik dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kebetulan Saya tidak pernah bergabung dengan partai manapun tetapi dapat dikatakan sebagai simpatisan di PDI Perjuangan sehingga menentukan pilihan. Pernah ditawarkan oleh partai lain sebelum bergabung ke PDI Perjuangan, lalu Saya tergerak masuk ke politik tetap di PDI Perjuangan.

3. Apa faktor yang menyebabkan Bapak begitu tertarik dengan PDI Perjuangan?
 → Saya membaca AD ART bahwa PDI Perjuangan itu berideologikan pancasila 1 Juni yang disampaikan oleh Ir, Soekarno pada sidang PPKI. Itulah yang membuat Saya tertarik, kemudian yang membuat Saya tertarik lagi itu adalah bahwa PDI Perjuangan itu isinya adalah rakyat; akar rumput. Jadi kita bergaul di bawah. Itu yang membuat Saya memantapkan di PDI Perjuangan. Dulu ada yang menarik saat Saya masuk di PDI Perjuangan. Jadi teman-teman Saya bilang: “Kamu di PDI Perjuangan tidak akan dapat apa-apa. Disana itu sudah suksukan rebutan”. Lha tapi kan yang Saya cari bukan posisinya tapi perjuangannya. Karena bagi Saya akhirnya berpolitik itu adalah seni mengambil atau merebut kekuasaan untuk memimpin. Lha setelah dapat kekuasaan itu kan kita punya kesempatan untuk memimpin bersama sama rakyat untuk mengimplementasikan., karna kalau mendapat kekuasaan itu memang kewenangan ada untuk membuat peraturan, menentukan anggaran dan sebagainya, mau kemana. Lha itu yang lebih besar ada disitu. Kalau kembali ke teman tadi yang juga bilang “bok sudah kamu di partai ini Saya, disana butuh kader nanti kamu bisa langsung jadi pimpinan”, lha ternyata berpolitik tidak

seperti begitu. Kita tidak mencari posisinya tetapi kita mencari untuk bisa berjuang di partai tersebut.

4. Bagaimana pendapat Bapak melihat fenomena pencalonan Kepala Daerah oleh PDI Perjuangan yang memiliki dua kandidat kuat sekaligus seperti yang terjadi di tahun 2020 lalu?

→ Kalau dengan PDI ya mungkin berpikirnya kan kalau PDI kursi di DPR nya banyak sehingga “nek ning Solo ora karo PDI ketoe kalah”, mungkin seperti itu. Tetapi begitulah kami diperebutkan oleh orang yang mempunyai kapasitas untuk memimpin. Saya kira itu. Karna kami mempunyai mesin partai hingga ke tingkat RW, Sehingga ketika kita menggerakkan mesin partai itu bisa langsung sampai ke bawah ke akarnya. Dan Solo ini adalah kekuatan primordialnya PDI Perjuangan. Jadi di PDI Perjuangan itu, Saya satu keluarga itu pasti akan mendidik anak Saya berjuang di PDI Perjuangan. Kalau Saya mengamati yang dulu kakeknya PDI Perjuangan, anaknya ya PDI Perjuangan, mantunya juga PDI Perjuangan, cucunya PDI Perjuangan. Nah itulah primordialisme ke keluarga yang tanpa mereka punya alasan yang aneh-aneh atau alasan yang detail. Kalau anda tanyakan ke bawah, kenapa PDI ya jawabnya: pokoe aku PDI, darahku PDI, darahku PNI Nasionalis, Aku nyoblos e yo PDI, Aku rak kenal sopo-sopo yo nyoblos e partai kok. Nah itulah kekuatan yang Saya dapat di taruna merah putih. Jadi tidak perlu alasan tertentu, karena memang ada yang militan seperti itu. Dan di politik ini memang dalam masa yang mengambang atau mencari tautan kesana kemari sehingga di setiap periode ini mereka yang berpindah.

5. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Solo adalah kekuatan primordial PDI Perjuangan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai proses pilkada Solo 2020 lalu?

→ Jadi di PDI Perjuangan dari atas sampe bawah itu kita terbiasa dengan hak yang diberikan di dalam kongres untuk ketua umum; Ibu Megawati Soekarnoputri. Jadi memang ini adalah kemenangan yang berjenjang. Ketika Achmad Purnomo-Teguh Prakosa itu adalah proses yang sudah diambil di tahapan tingkat kota sehingga bulat hasil penjangkungannya menghasilkan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Kemudian ada mekanisme lain lagi,

penjaringan kepala daerah itu tidak hanya melalui tingkat kota tetapi ada melalui tingkat provinsi dan DPP pusat. Kalau sudah begitu, karna kita taat konstitusi dan sudah diberikan mandat kepada Ibu ketua umum dalam hal ini hak prerogatif dalam penentuan rekomendasi makanya kami tegak lurus. Yang dikatakan tegak lurus itu begitu. Sehingga kami itu meskipun kalau ini sudah ngomong berpartai itu kan kita harus melepaskan kepentingan pribadi dan cita-cita pribadi. Karena kalau sudah bergabung ke partai, kita tidak bisa “tidak cocok dengan cita-cita itu” karna kita sudah bergabung dengan partai. Nah semacam rekomendasi yang diberikan itu adalah cita-cita bersama. Walau sebetulnya mekanisme internal itu ada melalui survei dan sebagainya, toh kan akhirnya itu bisa kita menangkan karena di PDI ini sudah lima periode kepala daerah. Nah dengan evaluasi perjalanan 5 tahun kemarin siapa yang kita dukung dan kita menangkan terus kepada DPP seperti apa itu mungkin di rapat Rakernas kemarin itu disampaikan dalam hal pemilihan kader yang diberi tanggung jawab untuk berkaris di eksekutif. Itu mungkin sudah jadi catatan di DPP. Saya kita itu dinamik. Ya jadi sekali lagi di kota itu berproses, di provinsi berproses, DPP berproses dan keputusan akhir adalah ada di ketua umum ketika memberikan rekomendasi dan ini sudah kesepakatan bersama. Memang mungkin ada yang tidak puas, tetapi hanya di internal, atau mungkin kalau ada yang tidak puas ya dilepas katakanlah, itu dipersilahkan karena itu hak pribadi. Di anggaran dasar sudah dijelaskan kok sebenarnya. jadi ketika bergabung, hak pribadi itu sudah melebur ke cita-cita partai. Sehingga berprosesnya begitu.

6. Bagaimana proses pemberian rekomendasi bakal calon wali kota?
→ Tentunya ada mekanisme di DPP bahkan tingkat kota sendiri ada survei internal. Jadi ada beberapa tahapan ketika mau memberikan rekomendasi, tentunya elektabilitas keterkenalan dulu, apakah semua masyarakat mengenal, kemudian kepopuleran dan elektabilitas bagaimana keterpilihannya. Nah parameter ini sudah dimiliki oleh DPC, DPD, DPP. Mereka selalu melakukan survei dan turun langsung ke masyarakat.
7. Kalau berdasarkan parameter yang telah bapak sebutkan, sebenarnya melalui survei yang dilakukan oleh Unisri dan juga Lembaga Survei Median itu

memberi hasil bahwa dalam aspek-aspek tersebut Achmad Purnomo memiliki keunggulan. Bagaimana tanggapan bapak soal hal ini?

→ Kalau Saya, dari situ ini adalah pertarungan dari kota dengan pertarungan yang pada saat itu ayahnya Mas Gibran kan masih presiden. Kalau ngomong kan semua warga berkerkesempatan sama, “kalau tidak suka Saya ya jangan pilih Saya dong” kan bahasanya begitu, tapi kan ini berbicara proses tentunya ini sedikit banyak berpengaruh meskipun tidak dapat dibuktikan secara eksplisit. Jadi ya mungkin masyarakat tau lah kenapa mas Gibran bisa dapat mandat dan kenapa mendaftarnya tidak di Solo. Sehingga tanggung jawab struktural solo selesai. DPC sudah memilihkan begini tetapi dari DPP ada calon lain ya kita harus terima, hukumnya rekomendasi harus kita menangkan. “Pertanggungjawabannya pie pak kok dudu calone dewe sing kepilih?” “Lho lha aku wes ngusulke sampe kesana tetapi DPP punya analisa yang lain.” Kalau ditanya kenapa kok ini tidak Pak Achmad Purnomo? Kenapa kok Mas Gibran? Kan ini parameternya banyak sekali bukan hanya sekedar “o ini keluarganya pak presiden” meskipun itu salah satunya ya, dibandingkan usia misalnya “o ini mewakili generasi muda” karena di politik kan harus memilih dan karena apa memilihnya, kan usianya beda jauh ini. Kalau soal menang oke menang karena PDI yang ngusung. Nah disitu sehingga pergolakan konstelasi politiknya disitu. Jadi faktornya ya kalau tadi Saya ngomong ya karena bapaknya presiden tetapi kan pasti ada alasan lain mungkin dari segi usia dimana yang ini mewakili generasi muda yang ini mewakili generasi baby boomers sekarang ini generasi X. Karena di DPP kemaren memang generasi X ini disiapkan untuk ikut Pilkada, karena yang generasi milenial dan Z mereka disiapkan untuk mengisi pos pos persiapan pekerjaan dulu untuk berkarir. Meskipun ada juga generasi Y dan Z yang juga disiapkan. Mas Gibran ini kan masuknya generasi Y atau milenial karena kelahiran 80-an.

8. Apakah sempat terjadi Bargaining position antara DPC dan DPP dalam proses pemberian rekomendasi kepala daerah di Solo tahun 2020 lalu?

→ Karena dari yang Saya dengar terdapat isu DPC mundur serentak bila rekomendasi mengingkari Achmad Purnomo. Kalau DPC nya berstatement Saya tidak mendengar, tetapi kalau personil iya. Ini kan karena militansi karena

kalau namanya sudah jadi pendukung, meskipun di internal partai itu sakitnya bukan main. Jadi Ya Saya pernah mendengar tetapi bukan DPC nya yang mau mundur tetapi ada beberapa personal yang menyampaikan seperti itu. Kan kalau personalnya ini struktural bisa dianggap strukturalnya yang bakal mundur, kan begitu. Tetapi kalau ini masih dalam proses ini adalah dialektika, daya tekan kepada DPP. Tetapi kalau sudah turun rekomendasi ya semua harus kembali ke awal keputusan wajib untuk kita menangkan rekomendasinya. Jadi Saya mendengarnya itu dari salah satu kandidasi yang cerita. Dulu waktu ini katanya mau gini gini gini, begitu, menjelaskannya seperti itu. Jadi itulah militansinya dan ini adalah proses. Ya seperti Saya ini kan punya tim yang sudah menyatu dengan Saya siang malem keliling sehingga keinginannya kuat bahwa Pak Wahyu harus jadi. Begitu juga dengan tadi bahwa ada orang yang menyampaikan begitu itu ya sebagai daya tekan. Tetapi kalau sudah rekomendasi ya ikut, termasuk Pak Rudy saat rekomendasinya turun ya harus menangkan ini dulu meskipun Pak Rudy harus tetap menjaga keseimbangan di satu sisi pak Purnomo yang sedang memperebutkan rekomendasi tetapi tidak terpilih. Lha ini coba rasanya jadi teman bagaimana. Di posisi politik itu aturan formal, tapi rasa kan masih ada. Bahkan ketika pak Rudy mau diangkat jadi menteri Pak Rudy gamau, ini cerita dari Pak Rudy sendiri: Aku njogo rosone Pak Pur. Nek Pak Rudy mau kan dianggep barter. Terus terang Saya menjadikan Pak Rudy sebagai patron Saya. Meskipun tidak diberi ilmu secara langsung tetapi Saya melihat o berpolitik itu seperti ini, di depan mata lho Wamen ditolak demi persahabatan atau demi yang dulu diperjuangkan. Kan Pak Rudy sebagai ketua DPC sudah menjaring Pak Achmad Purnomo meskipun tidak terpilih tetapi sampai sekarang hubungannya baik. Lha coba kalo tadi pak Rudy berangkat berkarir di Jakarta terus Pak Purnomo ditinggal lalu suara masyarakat sepereti apa? Suaranya Pak Pur dan keluarganya seperti apa? Jadi semacam itulah, ini prosesnya alami. Kemudian di politik ini kan kepentingan, ya ngga harus kepentingan pribadi harus sudah melebur jadi cita-cita partai.

9. Apakah dapat dikatakan bahwa PDI Perjuangan bersifat sentralistik?

→ Sentralistik, ya! Untuk mendisiplinkan kader partai. Karena kita harus mantap disiplin organisasi, mantap disiplin kader. Jadi sentralistiknya itu di

dalam progres progres pengambilan keputusan. Tetapi kalau sudah begini kita diberi keleluasaan. Kita berdiskusinya diberi kebebasan. Nah kalau sudah masuk ke proses-proses sentralistik tadi kan disana terjadi diskusi. Diskusinya dengan ketua DPC dengan prosesnya disitu. Ruang diskusinya ada tapi kalau sudah keputusan ya kita laksanakan.

10. Apakah terdapat penjelasan mengenai alasan pengambilan keputusan rekomendasi oleh pusat?

→ Kalau alasan tidak ada tidak disampaikan secara eksplisit mengapa ini dipilih dan ini tidak. Karena kalau sudah keputusan tidak ada lagi ruang diskusi. Kalau ruang diskusi lagi jadi tidak jalan. Karena kami menjadi partai yang disiplin dalam arti begini. Kalau menurut Saya, kalau sudah ada intruksi rekomendasi itu tidak ada ruang untuk diskusi. Jadi ruang diskusi itu ada sebelum menjadi keputusan kan didiskusikan. Semua kan mengakses kan diberikan informasi, itu proses. Jadi tidak ada yang namanya menyampaikan informasi itu ditolak, pasti diterima dulu.¹

11. Apakah mekanisme nya serupa untuk pencalonan legislatif?

→ Kalau legislatif, DPD itu dimulai dengan penjaringan. Penjaringan dari masyarakat anak ranting. Jadi yang dijaring itu pengurus, tokoh masyarakat, atau warga biasa. Semua nama yang diusungkan masuk ke tingkat PAC dulu kemudian PAC membuat urutan dan dari PAC masuk ke DPC diolah menjadi 100 nama berarti 200% dan dikurangi lagi menjadi 90 muncul DCS berarti muncul 45. Prosesnya begitu kemudian ini diusulkan ke DPP. DPP bisa menambahkan ataupun mencoret. Tetapi biasanya kalau legislatif ini yang sudah dari DPC itu DPC hanya melakukan pengujian tes aja. Bukti empirisnya di Solo ini tidak pernah ada perubahan, semua yang diusulkan ke DPP turunnya juga sama.

12. Artinya mekanisme dan kewenangan DPC dalam menentukan calon antara eksekutif dan legislatif memang berbeda ya Pak?

→ Ya. Contohnya ya di tahun ini untuk yang eksekutif DPC tidak diberi kewenangan untuk menentukan menilai. Jadi hanya menjaring kemudian dimasukan ke DPP. Meskipun tetap ada pendaftaran lewat provinsi dan Jakarta.

Kalau dulu kan penjaringan dimulai dari usulan anak ranting, kalau sekarang dibuka penjaringan orang eksternal dan internal mendaftar.

13. Adakah alasan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan mengenai perubahan kebijakan mekanisme pencalonan di tahun ini?

→ Keputusan ini kan munculnya setelah Rakernas ya. Semua diputuskan di dalam mekanisme partai tertinggi di dalam rakernas bukan orang per orang. Jadi kelihatannya saja tegak lurus ketua umum, dipikir sentralistik, tetapi prosesnya ada. Prosesnya berdasarkan konstitusi partai. Sehingga setelah Rakernas diputuskan penjaringan diikuti oleh eksternal dan internal partai.

14. Bagaimana pendapat Anda pribadi mengenai dinamika Pilkada di Solo 2020 lalu?

→ Saya melihatnya satu, pemilu sudah dilalui mekanismenya, pengusulan sudah dilalui mekanismenya, penurunan rekomendasi juga sudah dilalui mekanismenya, lalu kemudian ketika proses di Solo juga berjalan dengan partisipasi warga tidak terjadi penurunan. Ya itu proses yang dilalui. Perkara mungkin subjektivitas Saya, hati Saya sebenarnya mendukung Purnomo-Teguh tetapi kan sebagai politisi ya ini sudah dilalui semuanya, karena sebagai pemilihannya waktu mas Gibran kampanye, Saya dengan Taruna Merah Putih juga berkiprah. Saya sebagai Ketua Merah Putih tingkat Kota, Saya bersama temen-temen gotong royong menyukseskan pilkada tahun 2020 dari kampung ke kampung ndorong TV, Mas Gibran berinteraksi dengan warga.

15. Bisakah Saya menanyakan mengenai kepuasan partai terhadap kinerja Mas Gibran sebagai hasil kinerja partai menyukseskan pemilihannya sebagai wali kota?

Ya kalau kepuasan partai mestinya bertanya ke partai ya. Tapi kalau Saya pribadi, Saya bergabung dengan PDI Perjuangan itu cita-cita awal Saya itu menjadikan PDI sebagai perahu, dan kalau yang kemaren itu belum menunjukan kader yang militan dari yang Saya pelajari dan bandingkan. Ya memang ada beberapa kader yang berpindah karena tidak cocok dan selesai. Tetapi kan ini fenomena ya, kader yang dilahirkan oleh PDI Perjuangan kemudian keluar dan sekarang belum tahu sebagai kader di partai apa, tidak tahu masih memegang KTA ini belum dikembalikan. Tapi yang jelas komentar

Saya yang ingin Saya sampaikan bahwa ini ya dari yang Saya kenal dari kader akar rumput, kader struktural, kader DPC, sampai kader yang dia pernah menjadi wali kota itu ya dia bukan kader yang militan.

16. Adakah saran dari Bapak mengenai evaluasi mekanisme pencalonan oleh PDI Perjuangan ini?

Ya mungkin dengan peristiwa ini DPP sudah melakukan evaluasi ya, Saya kira Saya yakin dengan pengalaman yang didapat ini DPP sudah menjadi masukan besar. Soal pencalonan eksternal itu kan paling nanti ada pertimbangannya. Kita tidak yang kemudian menjadi trauma dengan kader yang baru bergabung. Makanya di dalam penjaringan ini nanti ya siapa yang kuat. Kan nanti ya hanya menjaga di dalam perjalanannya ini saja, komunikasinya dijaga. Tetapi ya berpolitik itu kan hampir semua manusia yang berpolitik ingin berkuasa. Politik ya seperti itu ingin berkuasa. Cuma berkuasanya ini jalannya seperti apa. Jadi ya masyarakat bisa melihat sendiri pasti ya ada pro dan kontra terutama untuk PDI yang militan.

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Kepada Informan

1. Wawancara kepada Fx. Hadi Rudyatmo selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surakarta pada Senin, 8 Juli 2024 di rumah pribadi milik Fx. Hadi Rudyatmo.



2. Wawancara kepada Suharsono, S.H., M.H. selaku kader PDI Perjuangan dan Anggota DPRD Kota Surakarta terpilih periode 2019-2024 pada Kamis, 13 Juni 2024 di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta.



3. Wawancara kepada YF Sukasno selaku kader PDI Perjuangan dan Anggota DPRD Kota Surakarta terpilih periode 2019-2024 pada Kamis, 13 Juni 2024 di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta.



4. Wawancara kepada Wahyu Haryanto, S.E. selaku kader PDI Perjuangan dan Anggota DPRD Kota Surakarta terpilih periode 2019-2024 pada Kamis, 13 Juni 2024 di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta.



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

03 JUN 2024

Nomor : 34 /UN7.F7/PP/VI / 2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan
Kota Surakarta

Dalam rangka mempersiapkan penulisan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surakarta

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Oktavia Deta Riawan
NIM : 14010120130148
Judul : Dominasi Oligarki dan Dinasti Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Surakarta Tahun 2020
Alamat Rumah : Jatisari Asabri A6/15, Mijen, Semarang
Alamat email : oktaviadeta@students.undip.ac.id
No. HP : 087709016724

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Yth: YF. Sukasno
Suharsono.
Honda H

mohon Bermana
menjadi Nara Sumber
untuk diwawancarai

7/6/2024

